



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDA NURLINDA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN DAN SUMBER DAYA
3. NHK : 765450

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.762.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.252.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/140 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.205.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/140 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.205.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 485.000.000

1. MOBIL, FORD FOCUS 2.0L AT-S Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, FORD ESCAPE 2.3L LIMITED A/T Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOBIL, BMW 320 I/E90 A/T Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. MOBIL, RENAULT KWID 1.0 CLIMBER 4X2 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. 8.050.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.938.857.323**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 18.235.857.323



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 18.235.857.323

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.